



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRIK SOMBO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 190221

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.110.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SORONG , HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/165 m2 di KAB / KOTA
SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 1.015.000.000
3. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **163.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **98.844.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **11.389.118**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.383.733.118**

III. HUTANG **Rp.** **300.588.032**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.083.145.086**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.